

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Alihar, Fadjri. (2017), *Strategi Geopolitik Penanganan Pulau-Pulau Terluar Indonesia*, Pusat Penelitian Kependudukan (LIPI), <https://kependudukan.lipi.go.id/en/population-study/human-ecology/389-strategi-geopolitik-penanganan-pulau-pulau-terluar-indonesia>, diakses pada 20 April 2020 pukul 20.00 WIB
- Atika. Nurul, *Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Wilayah Perbatasan Indonesia-Vietnam Tahun (2010-2014)*. Jom FISIP Volume 4 No.1 Februari 2017. Hlm. 4
- Bakry, U. S. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar (anggota IKAPI), ISBN: 978-602-229-540-2.
- Desriani., Rani, Faisyal. Strategi Pertahanan Wilayah Pulau Terluar Indonesia Terhadap Malaysia (Kasus Pulau Jemur Di Provinsi Riau), <https://media.neliti.com/media/publications/31261-ID-strategi-pertahanan-wilayah-pulau-terluar-indonesia-terhadap-malaysia-kasus-pula.pdf>, diakses pada 7 Juni 2020 pukul 15.00 WIB
- Gunadirja, et al. 1998. *Sejarah Diplomasi Republik Indonesia dari Masa ke Masa: Periode 1960-1965 (Buku IVB)*, (Jakarta: Departemen Luar Negeri RI, 1996)
- Hardiana, Indrita., Trixie, Benedicta., *Menuju Indonesia sebagai Negara Poros Maritim*, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <http://setkab.go.id/menuju-indonesia-sebagai-negaraporos-maritim>, diakses pada 2 Mei 2020
- Holsti, K. J. *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis*, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari, (Jakarta: Erlangga, 1988) Hal. 652-653
- Kusumo. A. T. S, (2010), *Optimalisasi Pengelolaan dan Pemberdayaan Pulau-pulau Terluar dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 3 September 2010. Diakses 24 September 2019.
- Lasabuda, Ridwan. (2013), "Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia", Jurnal Ilmiah Platax , Vol. I-2, Januari 2013, ISSN: 2302-3589
- Malik, Faissal., dkk. "Kebijakan Penataan Pulau-Pulau Terluar Di Provinsi Maluku Utara Dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Ganesha Law Review Volume 1 Issue 2, November 2019, P-ISSN : 2656-9744 E-ISSN : 2684-9038
- Marwasta. Djaka. *Pendampingan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Di Indonesia: Lesson Learned Dari Kkn-Ppm Ugm Di Kawasan Perbatasan*. Indonesian Journal of Community Engagement Vol. 01, No. 02, Maret 2016
- Mas'oeed, Mochtar. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi* (Jakarta:PT.Puastaka LP3ES, Indonesia, 1990), hlm. 18.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2000) .h. 3.
- Morgenthau, Hans J. 1946. *Scientific Man Versus Power Politics*, The University Of Chicago Press, Chicago, hal 3.
- Morgenthau, Hans J. 1973. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Justice* Alfred, A & Knoop, New York hal 3-4.

- Paskarina, Caroline. *Wacana Negara Maritim Dan Reimajinasi Nasionalisme Indonesia*. Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran. Jurnal Wacana Politik - Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Politik. Vol. 1, No. 1, Maret 2016: 1 – 8. ISSN 2502 – 9185
- Plano, Jack C., Olton, Roy. *The International Dictionary*, terj. Wawan Juanda, Third Edition, Clio Press Ltd. England, 1982, hlm. 7
- Rani, Faisyal. *Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Meningkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan Menurut Perspektif Sosial Pembangunan*. Jurnal Transnasional, Vol. 4, No. 1, Juli 2012. Hlm 3-4
- Siregar, Chairil N., dkk. *Ancaman Keamanan Nasional di Wilayah Perbatasan Indonesia: Studi Kasus Pulau Sebatik dan Tawau (Indonesia-Malaysia)*. SOSIOGLOBAL : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 4, No.1, Desember 2019. Hlm. 31
- Sitepu, P. Anthonius. *Teori Realisme Politik Hans J. Morgenthau Dalam Studi Politik Dan Hubungan Internasional*
- Soemarmi, Amiek., dkk. *Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, Halaman 241-248, p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
- Talumantak, Pertiwi. (2018), “Penegakan Hukum Terhadap Pulau-Pulau Terluar Indonesia Untuk Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Lex Et Societatis* Vol. VI/No. 10/Des/2018

Internet

- INSPEKTORAT JENDERAL Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Geliat Pembangunan Pulau-Pulau Terluar Melalui Program PSKPT KKP* <http://www2.kkp.go.id/itjen/artikel/134-geliat-pembangunan-pulau-pulau-terluar-melalui-program-pskpt-kkp> diakses pada 20 April 2020 pukul 22.00 WIB.
- MediaIndonesia.com, *Pulau Nipa Jadi Pilot Project Pulau Terluar Berbasis Pertahanan*, <https://mediaindonesia.com/read/detail/254522-pulau-nipa-jadi-pilot-project-pulau-terluar-berbasis-pertahanan>, di unggah 29 Agustus 2019, diakses pada 20 April 2020 pukul 19.00 WIB.
- Merdeka.com, 2014. “John Lie, kapten kapal heroik penembus blokade Belanda”, Peristiwa, 30 Januari 2014. dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/john-lie-kapten-kapal-heroik-penembus-blokade-belanda.html>, hal. 1 diakses pada 1 November 2019
- RMOL, 2015. “Ini Lima Pilar Poros Maritim Indonesia”, 19 November 2015. [Daring]. dalam <http://www.rmol.co/read/2015/12/19/228772/Ini-Lima-Pilar-PorosMaritim-Indonesia->, hal. 1 diakses 1 November 2019
- Said, Budiman D. *Maritim: inikah kepentingan nasional RI ?*, Forum Kajian Pertahanan Maritim, <http://www.fkpmar.org/maritim-inikah-kepentingan-nasional-ri/>, diakses pada 20 April 2020 pukul 18.30 WIB
- Sari, Fitriana. M. *Pemerintah Harus Genjot Pembangunan di Pulau Terluar*, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3367322/pemerintah-harus-genjot-pembangunan-di-pulau-terluar>, Liputan6.com, diakses pada 20 April 2020 pukul 21.00 WIB.

Peraturan dan Undang-Undang

- Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015 ISBN 978-979-8878-04-6. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Lembaran Negara Republik Indonesia No.200, 2015. PERTAHANAN. Pertahanan Negara.
2015-2019. Kebijakan Umum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 Pasal 4

Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Pasal 2

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-pulau kecil Pasal 2

Undang-undang No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia Pasal 1 ayat 1

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Bab V, pasal
10

Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, 2011, Rencana Induk Pengelolaan Batas

Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014, hal. 101 diakses 17 Juli
2020 pukul 22.00 WIB

Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rencana
Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2015

United Nations Convention on The Law of the Sea, 1982 pasal 46 dan